

**PERAN KOMITE SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI RINGGIT**

**KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO**

**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Kepada  
Program Studi Manajemen Pendidikan  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Manajemen Pendidikan



Oleh:

SUWARDI

NIM: Q.100.100.208

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2012**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PERAN KOMITE SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI RINGGIT KECAMATAN  
NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO**

TELAH DISETUJUI OLEH

Pembimbing I



Dr. Eko Supriyanto, S.H,M.Hum

Pembimbing II



Dr. Sabar Narimo, M.M,M.Pd

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2012**

**PERAN KOMITE SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI RINGGIT KECAMATAN  
NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO**

**Oleh:**

**Suwardi<sup>1</sup>, Eko Supriyanto<sup>2</sup>, Sabar Narimo<sup>3</sup>**  
**<sup>1</sup>Guru, <sup>2</sup>Staff Pengajar UMS Surakarta,**  
**<sup>3</sup> Staff Pengajar UMS Surakarta**

**Abstract**

The paper addressed to describe and explain the role of the school committee in SDN Ringgit Purworejo. This is a qualitative research that conducted in SD N Ringgit Purworejo used observation, interview and documentation. Data validity test used the credibility, transferability, dependability, and confirmability. The results of this research are (1) the position of the school committee in the preparation of RKAS is same with the principal. School committee participated in providing input on the budget funds will be made by the school. School committees submit feedback, consideration, or a recommendation in writing to the school about the program that should be a priority in the preparation of RKAS. School Committee socialization the result of RKAS meeting to parents. (2) the position of the school committee in oversight the RKAS is less than principal. The school committee is only tasked to oversee the implementation of RKAS. The supervision that is done by the school committee is through accountability reports made by the treasurer of the school which has been approved by the principal. School Committee is check the report that made by school treasurer every three months. The supervision that is done by the school committee consists of eight aspects of national education standards. (3) The position of the school committee in the evaluation RKAS is dominant when it compared with the principal. In RKAS evaluation activities, the school committee acts as an evaluator whose job is to evaluate the implementation of RKAS, whether it is in accordance with the plan or not. In the evaluation, supervision models dilakukan by the school committee as a formal oversight committee is directly involved in the evaluation RKAS. RKAS evaluation in schools can also be used to learn about the factors supporting and inhibiting the implementation of the eight aspects of national education standards.

*Keywords: school committees, budgets, control, evaluation*

**PENDAHULUAN**

Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan.

Manajemen keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan jujur.

Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.

Sampai saat ini sumber dana pendidikan di sekolah negeri sebagian besar berasal dari pemerintah atau subsidi pemerintah sangat besar. Sedangkan sumber dana pendidikan sekolah-sekolah swasta sebagian besar dari orang tua atau SPP (Anonim, 2004: 62). Idealnya pemberian subsidi tidak berdasarkan pemilik, tetapi anak yang orang tuanya kurang mampu mendapatkan subsidi, sementara anak yang orang tuanya mampu tidak mendapat subsidi.

Penggunaan dan alokasi dana rutin maupun pembangunan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia dalam menetapkan alokasi anggaran belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas, sehingga menjadi wajar jika pendidikan Indonesia selama ini tertinggal bukan karena anggaran yang tidak mencukupi, melainkan karena political will dari pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan. Alokasi anggaran untuk APBN bukan

berdasarkan usul sesuai kebutuhan riil tiap-tiap sekolah di daerah atas usul daerah, bukan atas pemikiran atau kemauan pemerintah (Sagala, 2009:215).

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian (Sudrajat, 2010: 2).

Penganggaran dalam organisasi sektor publik khususnya sekolah merupakan tahapan aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode dan waktu tertentu. Perencanaan anggaran (penganggaran) merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran (Mulyasa, 2007a: 199).

Perencanaan anggaran pendidikan di sekolah merupakan kegiatan merencanakan sumber dana yang ada dan menggunakannya untuk menunjang kegiatan pendidikan di sekolah. Nanang Fattah (2004: 47) menyatakan bahwa perencanaan anggaran (penganggaran) merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). Perencanaan anggaran merupakan penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Ada dua bagian penting dalam perencanaan anggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan penyajian pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat direalisasikan. Dengan demikian anggaran dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Proses perencanaan anggaran di sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan: (1) sumber pendapatan sekolah baik dari pemerintah, orang tua siswa dan pendapatan lainnya dan (2) pengeluaran untuk kegiatan belajar-mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran serta honorarium dan kesejahteraan. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran, Lipham (1985) dalam Mulyasa (2007b: 199) mengungkapkan empat fase kegiatan pokok penganggaran yaitu: (1) merencanakan anggaran, (2) mempersiapkan anggaran, (3) mengelola pelaksanaan anggaran dan (4) menilai pelaksanaan anggaran.

Selain itu proses perencanaan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana kegiatan sekolah. Banyak faktor yang mempengaruhi proses perencanaan anggaran pendidikan di sekolah, seperti perkembangan peserta didik, inflasi, pengembangan program, dan perbaikan serta peningkatan pendekatan belajar mengajar untuk memberikan kepuasan dan pelayanan yang baik kepada warganya (Mulyasa, 2007b: 199).

Dalam era desentralisasi di bidang pendidikan sekarang ini peran serta masyarakat menjadi sangat penting artinya bagi kehidupan suatu sekolah. Organisasi yang diharapkan mampu untuk menampung seluruh aspirasi dan peran serta masyarakat tersebut adalah Komite Sekolah. Komite Sekolah merupakan badan atau lembaga non profit dan non politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah secara demokratis oleh stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas, proses dan hasil pendidikan. Permasalahannya adalah apakah dengan terbentuknya organisasi yang bernama Komite Sekolah itu akan menjadi suatu jaminan bakal mampu membantu pengelolaan pendidikan di satu sekolah.

Pembentukan Komite Sekolah didasarkan pada UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas). Kemudian dijabarkan

dalam Keputusan Menteri Pendidikan No. 044/U/2002 yang merupakan acuan pembentukan komite sekolah. Prinsip dari pembentukan komite sekolah didasarkan pada prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan. Peran komite sekolah adalah melakukan evaluasi dan pengawasan dalam pengelolaan dana sekolah dan bersama pihak sekolah melaporkan serta mempertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan masyarakat umum. Namun peran komite lebih condong/memihak pada sekolah dari pada membela kepentingan siswa dan masyarakat (Rizal, 2009: 7).

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah berupa (a) pemberi pertimbangan(*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (b) pendukung (*supporting agency*) baik yang berujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan, (c) pengontrol(*controlling agenc*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, (d) mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Anonim, 2003: 23-24).

Kurang maksimalnya peran komite sekolah dalam pengelolaan keuangan di sekolah, khususnya transparansi laporan keuangan, selama ini disebabkan posisi orangtua itu sendiri lemah di hadapan pihak sekolah. Pengetahuan mereka rata-rata minim untuk bisa menjadi kritis terhadap pengelolaan keuangan oleh sekolah sehingga tidak salah jika perlu mendapatkan bimbingan

Keberadaan Dewan Pendidikan harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat kabupaten/ kota. Sedangkan komite sekolah keberadaannya harus

bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan.

Dalam mekanisme penyusunan rancangan, pelaksanaan, dan penyusunan pelaporan pelaksanaan RKAS menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan komite sekolah dalam menyusun RKAS. Setiap tahapan penyusunan RKAS tersebut saling bekerja sama antara kepala sekolah dengan komite sekolah dan hasilnya harus mendapat pengesahan dari komite sekolah untuk menjadi RKAS. Hal ini dengan harapan bahwa sebagian dana atau anggaran penerimaan RKAS tersebut berasal dari anggaran yang mungkin diusahakan oleh komite sekolah sesuai dengan peran komite sekolah sebagai controlling agency atau badan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah, termasuk pelaksanaan dan penggunaan RKAS. Dengan demikian jelas bahwa apabila peran dan fungsi komite sekolah dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya, baik fungsi yang berkaitan dengan pengadaan dana dan fungsi pengawasan, maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan mampu menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu tinggi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas sekolah di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Gamage dan Sooksomchitra (2004) dalam penelitiannya yang berjudul *"Decentralization and School-Based Management in Thailand"*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa diperlukan adanya keikutsertaan anggota sekolah dan masyarakat di luar sekolah (orang tua, komite sekolah, masyarakat di sekitar lingkungan sekolah) untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen.

Keung Yau dan Fong Cheng (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *"The Effectiveness of 'Financial Planning and Control' in School-Based Management"*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan sekolah diperlukan adanya perencanaan yang



baik. Selain itu juga diperlukan adanya partisipasi dari guru untuk memberikan masukan kepada kepala sekolah tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

McNeil (2008) dalam penelitiannya yang berjudul *"Overhaul School Finance Systems, Researchers Urge; Link Funds to Outcomes, Carefully Track Spending to Improve Achievement"*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penentuan kebijakan yang dilakukan disekolah harus berorientasi terhadap pencapaian mutu pendidikan disekolah. Sehingga sekolah harus memberikan informasi tentang biaya yang dibelanjakan sekolah kepada orang tua sebagai penyumbang dana sekolah.

Ifijeh Goodluck (2001) dalam penelitiannya yang berjudul *"Budgeting for knowledge management in organizations"*. Penelitian ini membahas proses yang terlibat dalam penganggaran untuk manajemen pengetahuan dalam organisasi. Hal ini juga menyoroti peran penting dari anggaran yang tepat dan mengidentifikasi sumber-sumber dan kendala pendanaan anggaran dalam organisasi. Artinya dalam proses pengelolaan keuangan diperlukan adanya penganggaran terlebih dahulu.

Sello Mokoena (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *"Participative Decision-making: Perceptions of School Stakeholders in South Africa"*. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa kepala sekolah harus menciptakan ruang untuk debat dan dialog bagi semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi di sekolah. Seperti mengizinkan para stakeholder untuk mengajukan ketidakpuasan mereka dan memastikan hak mereka untuk berpartisipasi dalam isu-isu yang berhubungan dengan pengelolaan sekolah.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka peneliti ingin membahas tentang peran komite sekolah di SDN Ringgit Purworejo. Fokus dalam penelitian ini adalah peran komite sekolah di SDN Ringgit Purworejo. Dengan sub fokus (1) Bagaimana peran komite sekolah dalam penyusunan RKAS di SDN Ringgit Purworejo?, (2) Bagaimana peran komite sekolah dalam melakukan

pengawasan dan kontrol RKAS di SDN Ringgit Purworejo?, (3) Bagaimana peran komite sekolah dalam mengevaluasi pelaksanaan RKAS di SDN Ringgit Purworejo?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Peran komite sekolah dalam penyusunan RKAS di SDN Ringgit Purworejo. (2) Peran komite sekolah dalam melakukan pengawasan dan kontrol RKAS di SDN Ringgit Purworejo. (3) Peran komite sekolah dalam mengevaluasi pelaksanaan RKAS di SDN Ringgit Purworejo.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat Akademik yaitu dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan, khususnya berkenaan dengan pengembangan partisipasi masyarakat. Dan manfaat praktis (1) Bagi sekolah agar dalam menyusun dan menetapkan anggaran pendidikan dalam bentuk RRKAS dan RKAS lebih menekankan pada asas musyawarah mufakat, keadilan, transparan akuntabilitas dan kemampuan masyarakat. (2) Bagi masyarakat khususnya anggota Komite Sekolah agar lebih memahami tentang peran dan fungsinya bagi sekolah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam menentukan anggaran pendidikan di sekolah. (3) Bagi peneliti sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang cukup dan memadai dalam permasalahan yang diteliti ini.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2006: 4) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Rancangan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian etnografi. Spradley dalam Mantja (2007: 6) menyatakan etnografi ditekankan pada tujuannya. Tujuan utama etnografi adalah untuk memahami pandangan hidup orang lain dari cara pandang pelakunya.

Moleong (2006: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian adalah kepala sekolah, dan tenaga administrasi di SDN Ringgit Purworejo selaku orang yang mengetahui keadaan di sekolah. Selain itu sumber data juga diperoleh dari anggota komite sekolah. Sumber data juga dapat diperoleh dari data-data ketika peneliti melakukan wawancara dengan narasumber. Nara sumber dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, tenaga administrasi dan anggota komite sekolah.

Ada tiga teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu: (1) wawancara, (2) observasi dan (3) studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman (2007:16) dalam model ini tidak ada komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus.

Ada empat pokok permasalahan yang harus diperhatikan para peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif untuk menguji sekaligus menjadi kriteria mengenai keabsahan temuan penelitian, yaitu seperti yang diungkapkan Moleong (2006: 324-327) bahwa terdapat empat kriteria dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu (1) *credibility*, (2) *transferability*, (3) *dependability*, dan (4) *confirmability*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran komite sekolah dalam penyusunan RKAS di SDN Ringgit Purworejo.**

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAS) diawali dengan pembentukan tim penyusunan RKAS yang beranggotakan kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, dan komite sekolah. Keikutsertaan komite sekolah dalam tim penyusunan RPABS merupakan salah satu peran komite dalam penyusunan RKAS.

Komite sekolah ikut serta dalam membuat RRKAS mengenai alokasi keuangan sekolah. Pihak sekolah membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai hal-hal apa saja yang akan dibiayai. Biasanya diawali dengan pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RRKAS).

Ifijeh Goodluck (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penelitian ini membahas proses yang terlibat dalam penganggaran untuk manajemen pengetahuan dalam organisasi. Hal ini juga menyoroti peran penting dari anggaran yang tepat dan mengidentifikasi sumber-sumber dan kendala pendanaan anggaran dalam organisasi. Artinya dalam proses pengelolaan keuangan diperlukan adanya penganggaran terlebih dahulu.

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian. Persamaannya adalah dalam kegiatan pengelolaan keuangan diperlukan adanya penyusunan anggaran. Perbedaannya adalah meskipun di SD N Ringgit telah dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah namun dalam pelaksanaannya sering terjadi perbedaan.

Kegiatan pembuatan RRKAS tersebut merupakan langkah awal dari penyusunan perencanaan pengelolaan dana yang dimiliki sekolah. Karena dari RRKAS tersebut diketahui berapa jumlah dana yang dimiliki sekolah dan berapa jumlah dana yang akan di belanjakan sekolah. Penyusunan RKAS pihak sekolah mendengarkan masukan dari anggota sekolah. Masukan tersebut yang nantinya akan digunakan oleh bendahara sekolah dalam menyusun anggaran sekolah. Karena dari masukan-masukan tersebut dapat diketahui program mana yang akan menjadi prioritas dalam penyusunan RKAS.

Keung Yau dan Fong Cheng (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan sekolah diperlukan adanya perencanaan yang baik. Selain itu juga diperlukan adanya partisipasi dari guru untuk memberikan masukan kepada kepala sekolah tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian. Persamaanya dalam menyusun anggaran keuangan sekolah diperlukan peran serta dari semua anggota sekolah untuk memberikan masukan tentang program yang akan dilaksanakan sekolah. Perbedaannya adalah meskipun di SD N Rinngit sudah melibatkan komite sekolah dalam penyusunan RKAS namun peran sertanya belum dilaksanakan secara maksimal.

Dalam kegiatan penyusunan RKAS, komite sekolah pada dasarnya tidak terlibat secara langsung. Karena keberadaan komite sekolah dalam penyusunan RKAS adalah sebagai pemberi pertimbangan. Komite sekolah memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang akan dilakukan sekolah. Misalnya memberi pertimbangan mengenai pengelolaan dana BOS. Peran serta komite memang sangat dibutuhkan guna membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah. Peran serta tersebut biasanya terlihat ketika pihak sekolah meminta pertimbangan kepada komite sekolah mengenai program-program yang akan dilakukan sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan dana sekolah yang berasal dari dana BOS. Komite sekolah hanya menyampaikan masukan, pertimbangan, atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah tentang prgram-program apa saja yang seharusnya menjadi prioritas dalam penyusunan PABS.

Komite sekolah di SDN Ringgit tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan RKAS. Komite sekolah hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Komite sekolah hanya memberikan masukan kepada kepala sekolah melalui bendahara sekolah. Kedudukan komite sekolah dalam penyusunan RKAS di SDN Ringgit sejajar dengan kepala sekolah. Alasannya adalah dalam penyusunan RKAS komite sekolah ikut berperan dalam memberikan masukan kepada pihak sekolah tentang kegiatan apa saja yang akan dibiayai oleh sekolah serta besarnya alokasi dana yang akan digunakan oleh sekolah.

Kegiatan selanjutnya dalam penyusunan RKAS adalah pihak sekolah melaksanakan rapat dengan komite sekolah. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas kegiatan yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaannya berdasarkan masukan dari anggota sekolah. Dalam rapat tersebut komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan terhadap rapat.

Dalam kegiatan yang dihadiri komite sekolah untuk membahas penyusunan RKAS, komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan untuk keputusan yang nantinya akan diambil sekolah. Karena untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah berasal dari masukan anggota sekolah sehingga dapat diketahui kegiatan mana yang akan menjadi prioritas dalam penyusunan RKAS.

Kegiatan yang dilakukan setelah program sekolah di setujui dalam rapat adalah sosialisasi hasil rapat kepada orang tua siswa. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut komite sekolah memiliki peranan untuk memberitahukan hasil rapat kepada para orang tua siswa. Komite sekolah berperan sebagai pemberi informasi bagi orang tua siswa yang ingin mengetahui program-program apa saja yang akan dilaksanakan oleh sekolah.

Komite sekolah di SDN Ringgit Purworejo berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi hasil rapat tentang program sekolah. Komite sekolah bertugas untuk mensosialisasikan hasil rapat antara sekolah, bendahara sekolah, perwakilan orang tua siswa dan komite sekolah yang membahas tentang program sekolah. Kegiatan penyusunan RKAS selanjutnya adalah mengesahkan hasil rapat yang telah disosialisasikan kepada orang tua siswa. Hasil rapat tersebut kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara sekolah dan komite sekolah. Hasil rapat tersebut kemudian siap untuk direalisasikan oleh sekolah.

## **2. Peran komite sekolah dalam melakukan pengawasan dan kontrol RKAS di SDN Ringgit Purworejo.**

Pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan RKAS di sekolah dilakukan oleh semua anggota sekolah. Para anggota sekolah memiliki peranannya masing-masing dalam melakukan pengawasan misalnya kepala sekolah, guru dan bendahara sekolah melakukan pengawasan secara langsung dalam pelaksanaannya di sekolah. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah tidak dapat dilakukan secara langsung di lapangan. Komite sekolah melakukan pengawasan dari jauh melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara sekolah.

Kedudukan komite sekolah dalam pengawasan pelaksanaan RKAS di SD N Ringgit kalah dari kepala sekolah. Alasannya adalah komite sekolah hanya mengawasi pelaksanaan RKAS. Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh bendahara sekolah yang telah disetujui oleh kepala sekolah. Hal itu dapat diartikan bahwa model pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah adalah pengawasan informal.

Komite sekolah di SDN Ringgit melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RKAS secara tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara sekolah. Dari laporan tersebut dapat dilihat apakah semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau belum.

Dalam pelaksanaan pembelanjaan RKAS, diperlukan peran serta dari semua anggota sekolah yaitu kepala sekolah, guru, bendahara sekolah dan komite sekolah. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antara sekolah dengan komite sekolah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gamage dan Sooksomchitra (2004) menyatakan bahwa diperlukan adanya keikutsertaan anggota sekolah dan masyarakat di luar sekolah (orang tua, komite sekolah, masyarakat di sekitar lingkungan sekolah) untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen.

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian. Persamannya adalah kedua penelitian membahas tentang keikutsertaan masyarakat di luar lingkungan sekolah seperti komite sekolah dalam kegiatan peningkatan kualitas sekolah dan manajemen sekolah. dan perbedaannya dalam penelitian tidak dijelaskan bentuk keikutsertaan komite sekolah dalam peningkatan kualitas sekolah dan manajemen.

Keikutsertaan komite sekolah dalam pelaksanaan RKAS adalah sebagai pengawas atau pengontrol pelaksanaan RKAS. Tugas komite sekolah mengawasi pelaksanaan RKAS apakah sudah sesuai dengan anggaran yang ada atau belum. Dalam pengawasan pelaksanaan RKAS, selain komite sekolah juga dilaksanakan oleh tokoh masyarakat dan instansi terkait (UPT P dan K).

Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah adalah dengan memeriksa laporan yang dibuat bendahara sekolah setiap tiga bulan sekali. Laporan tersebut berisi tentang kegiatan-kegiatan atau program yang telah dilaksanakan oleh sekolah beserta besarnya rincian dana yang telah dibelanjakan. Komite sekolah berkoordinasi dengan pihak sekolah terutama bendahara sekolah dalam mengontrol anggaran yang dikeluarkan sekolah. Hal ini dilakukan melalui laporan keuangan yang disampaikan oleh bendahara sekolah. Bendahara mempunyai tugas untuk mengelola keuangan yang dimiliki oleh sekolah yang dibantu oleh anggota sekolah lainnya.

Dukungan yang diberikan komite sekolah adalah komite sekolah ikut serta dalam memantau kondisi anggaran pendidikan yang ada disekolah. Dukungan tersebut berupa pemberian kepercayaan kepada sekolah dalam mengelola dana yang dimiliki sekolah. Hal ini dibenarkan oleh McNeil (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penentuan kebijakan yang dilakukan disekolah harus berorientasi terhadap pencapaian mutu pendidikan disekolah. Sehingga sekolah harus memberikan informasi tentang biaya yang dibelanjakan sekolah kepada orang tua sebagai penyumbang dana sekolah.



Dari penelitian yang dilakukan oleh McNeil terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian. Persamaannya adalah dalam meningkatkan kualitas sekolah dibutuhkan adanya kebijakan yang sesuai dengan kondisi sekolah. Sedangkan perbedaannya adalah terkait kebijakan yang diambil oleh sekolah tidak memperhatikan kondisi yang sedang terjadi di sekolah.

Dalam pelaksanaan RKAS, pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi delapan aspek standar nasional pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Kedelapan aspek tersebut merupakan pendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah. SD N Ringgit menunjukkan bahwa dalam kegiatan pengawasan RKAS yang dilakukan oleh komite sekolah selain dalam pelaksanaannya juga dalam pelaporannya. Komite sekolah mengawasi hasil laporan yang dibuat oleh bendahara sekolah. Dari laporan tersebut dapat diketahui bagaimana pelaksanaan RKAS.

### **3. Peran komite sekolah dalam mengevaluasi pelaksanaan RKAS di SDN Ringgit Purworejo.**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAS) diperlukan adanya proses evaluasi. Proses evaluasi dalam RKAS merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan RKAS. Karena hasil evaluasi tersebut yang nantinya akan dijadikan acuan dalam penyusunan RRKAS untuk periode satu tahun yang akan datang.

Kegiatan evaluasi berisi tentang semua kegiatan atau program sekolah yang sudah dilaksanakan untuk periode satu tahun. Dalam kegiatan evaluasi, komite sekolah berperan sebagai evaluator terhadap pelaksanaan RKAS. Komite mengevaluasi apakah pelaksanaan RKAS sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Di SD N Ringgit, peran komite sekolah dalam

pelaksanaan evaluasi RKAS adalah sebagai evaluator. Sebagai evaluator, komite sekolah mengevaluasi terhadap pelaksanaan RKAS. Dalam pelaksanaan evaluasi, komite sekolah mengevaluasi pelaksanaan RKAS apakah dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau tidak. Dan di SDN Ringgit pelaksanaan evaluasi RKAS sudah sesuai dengan perencanaannya.

Kedudukan komite sekolah dalam kegiatan evaluasi RKAS di SD N Ringgit dominan dengan kepala sekolah. Alasannya adalah dalam kegiatan evaluasi RKAS, komite sekolah berperan sebagai evaluator yang bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan RKAS, apakah sudah sesuai dengan perencanaannya atau belum. Karena apabila kegiatan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan maka pihak sekolah harus mempertanggungjawabkannya. Dalam kegiatan evaluasi, model pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah adalah pengawasan formal karena komite terlibat langsung dalam kegiatan evaluasi RKAS.

Pelaksanaan evaluasi oleh komite sekolah dilakukan untuk memberi masukan kepada sekolah terhadap perencanaan program untuk periode selanjutnya. Karena dari hasil evaluasi dapat diketahui persentase keberhasilan dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sekolah. Sehingga untuk periode tahun selanjutnya akan dibuat perencanaan yang lebih baik. Setelah komite sekolah melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban RKAS, komite sekolah dapat memberikan masukan untuk merencanakan program atau kegiatan yang lebih sesuai dengan kondisi sekolah.

Dalam kegiatan evaluasi, komite sekolah juga ikut serta dalam memberikan masukan kepada sekolah untuk membuat suatu keputusan tentang kelanjutan, perluasan dan penghentian suatu program. Maksudnya adalah apakah suatu program itu akan dilanjutkan atau dihentikan pelaksanaannya. Hal itu dilakukan berdasarkan hasil laporan

pertanggungjawaban yang dibuat bendahara. Karena dari hasil evaluasi dapat diketahui persentase program tersebut telah dilaksanakan.

Sello Mokoena (2011) menyatakan bahwa kepala sekolah harus menciptakan ruang untuk debat dan dialog bagi semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi di sekolah. Seperti mengizinkan para stakeholder untuk mengajukan ketidakpuasan mereka dan memastikan hak mereka untuk berpartisipasi dalam isu-isu yang berhubungan dengan pengelolaan sekolah.

Komite sekolah memberi masukan untuk menghentikan sementara program pembelian komputer untuk perpustakaan. Alasannya karena jumlah komputer yang dimiliki saat ini masih bisa digunakan oleh siswa secara bergantian.

Pelaksanaan evaluasi RKAS, komite sekolah di SD N Ringgit ikut serta dalam memberikan masukan terhadap keputusan tentang kelanjutan, perluasan dan penghentian program yang dilaksanakan sekolah. Maksudnya adalah apakah suatu program itu akan dilanjutkan atau dihentikan pelaksanaannya. Hal itu dilakukan berdasarkan hasil laporan pertanggungjawaban yang dibuat bendahara. Pelaksanaan evaluasi RKAS di sekolah juga dapat digunakan untuk mengetahui tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan delapan aspek standar nasional pendidikan. Informasi tentang faktor pendukung dan penghambat tersebut sangat bermanfaat bagi sekolah, komite sekolah dan Dinas Pendidikan. Karena dengan mengetahui faktor yang mendukung maka dapat mengoptimalkan perannya serta meminimalkan faktor yang dapat menghambat peningkatan kualitas sekolah.

Pelaksanaan evaluasi RKAS, komite ikut mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Dengan mengetahuinya maka pihak sekolah

dapat memaksimalkan faktor pendukung tersebut sehingga kualitas sekolah semakin meningkat.

## **PENUTUP**

Dari uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Kedudukan komite sekolah dalam penyusunan RKAS di SD N Ringgit sejajar dengan kepala sekolah. Komite ikut serta dalam memberikan masukan tentang besarnya anggaran dana yang akan dibuat oleh sekolah. Komite sekolah menyampaikan masukan, pertimbangan, atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah tentang program-program apa saja yang seharusnya menjadi prioritas dalam penyusunan RKAS. Komite sekolah melakukan sosialisasi hasil rapat RKAS kepada orang tua siswa. (2) Kedudukan komite sekolah dalam pengawasan pelaksanaan RKAS di SD N Ringgit kalah dari kepala sekolah. Komite sekolah hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan RKAS. Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh bendahara sekolah yang telah disetujui oleh kepala sekolah. Komite sekolah memeriksa laporan yang dibuat bendahara sekolah setiap tiga bulan sekali. Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi delapan aspek standar nasional pendidikan. (3) Kedudukan komite sekolah dalam kegiatan evaluasi RKAS di SD N Ringgit dominan apabila dibandingkan dengan kepala sekolah. Dalam kegiatan evaluasi RKAS, komite sekolah berperan sebagai evaluator yang bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan RKAS, apakah sudah sesuai dengan perencanaannya atau belum. Dalam kegiatan evaluasi, model pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah adalah pengawasan formal karena komite terlibat langsung dalam kegiatan evaluasi RKAS. Pelaksanaan evaluasi RKAS di sekolah juga dapat digunakan untuk mengetahui tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan delapan aspek standar nasional pendidikan.

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut (1) Bagi sekolah hendaknya lebih memaksimalkan peran komite sekolah khususnya dalam pengelolaan RKAS seperti dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi RKAS. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat terkontrol dengan baik. (2) Bagi komite sekolah hendaknya ikut terlibat sejak awal dalam pengelolaan keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga komite sekolah dapat memahami betul tentang penggunaan dana yang dimiliki oleh sekolah. (3) Bagi Peneliti yang akan datang, diharapkan dapat lebih kreatif serta lebih objektif dalam memilih permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan komite sekolah sehingga mampu memberikan solusi peningkatan peran serta komite sekolah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas*. Bandung: Fokusmedia.
- Anonim. 2004. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*
- Goodluck, Ifijeh. (2011). Budgeting for knowledge management in organizations. *Chinese Librarianship: an International Electronic Journal*, 32. URL: <http://www.iclc.us/cliej/cl32goodluck.pdf>
- Gamage, David T. dan Sooksomchitra, Pacharapimon. 2004. Decentralisation and School-Based Management in Thailand. *International Review of Education – Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft – Revue Internationale de l'Education* 50: 289–305, 2004.
- Keung Yau dan Fong Cheng. 2011. The Effectiveness of 'Financial Planning and Control' in School-Based Management. *e-Journal of Organizational Learning and Leadership* Volume 9, Number 2.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mantja. 2007. *Etnografi; Desain Penelitian Kualitatif Pendidikan dan Manajemen Pendidikan*. Malang: Elang Mas

- Mokoena, Sello. 2011. Participative Decision-making: Perceptions of School Stakeholders in South Africa. *J Soc Sci*, 29(2): 119-131 (2011)
- Miles, Mattew dan Huberman, Michael. 2004. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:Universitas Indonesia.
- Mulyasa. 2007a. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung. Rosda Karya
- Mulyasa. 2007b. *Menjadi Kepala sekolah Profesional*. Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fattah. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rizal. 2010. Standar Pengelolaan Pendidikan. (diakses tanggal 13 Desember 2011) <http://rizalsangpejuang.blogspot.com/2010/01/standar-pengelolaan-pendidikan.html>
- Sagala, Syaiful. 2007. *Manajemen strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sudrajat, Akhmad. 2010. *Konsep Dasar Manajemen Keuangan Sekolah*. <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/>(diakses tanggal 13 Desember 2011)